

BUPATI MANOKWARI SELATAN JABARKAN PROGRAM PRIORITAS APBD T.A 2025



sumber gambar: chatgpt.com

Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran, menunjukkan perhatian besar terhadap kelanjutan pembangunan daerah meskipun menghadapi tantangan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A 2025. Apresiasi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari Selatan (Mansel) yang telah menetapkan APBD, menunjukkan adanya komitmen untuk memastikan program-program prioritas tetap berjalan meski dalam kondisi efisiensi anggaran.

Beberapa program prioritas yang akan dilanjutkan, seperti pembangunan lanjutan Kantor Bupati di Bukit Boako Ransiki, penyelesaian pembangunan gedung DPRK, serta sarana dan prasarana pendukung, adalah langkah penting untuk memperkuat infrastruktur dan fasilitas pemerintahan. Selain itu, pembangunan sarana pendukung Bandara Mawar Abreso juga menjadi fokus, karena sektor transportasi menjadi kunci dalam memperlancar mobilitas dan aksesibilitas daerah.

Alokasi anggaran untuk sektor perekonomian dan pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan, juga sangat penting. Dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp853,2 miliar, APBD Mansel 2025 memiliki banyak program yang perlu dituntaskan, meskipun ada pemangkasan anggaran. Markus Waran juga memberikan pesan yang bijak terkait serah terima tugas kepada Bupati yang baru, dengan harapan agar program-program yang belum selesai dapat dilanjutkan dan diselesaikan pada tahun berikutnya, menggunakan APBD yang ada.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mansel sudah mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk memastikan pembangunan berjalan meski anggaran terbatas. Fokus pada penyelesaian infrastruktur dasar dan fasilitas pemerintahan menjadi langkah prioritas.

Sumber Berita:

Taburapos.com, *“Bupati Waran Jabarkan Program Prioritas APBD T.A 2025”*, tanggal 4 Februari 2025

Catatan:

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada Diktum Kesatu menyatakan bahwa melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja:
 - a. Kementerian/lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
 - b. APBD Tahun Anggaran 2025;
 - c. Transfer ke Daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - a. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 - b. Pasal 1 angka 35 menyatakan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

PUPR Kaimana Anggarkan Rp14 Miliar Lanjutkan Pembangunan Jaringan Air Bersih



Petugas dari Dinas PUPR Kaimana saat melakukan pengecekan instalasi jaringan pipa air bersih di Kaimana (ANTARA/HO-Isabela Wisang)

Sumber gambar: papuabarat.antaranews.com

Kaimana - Anggaran sebesar Rp 14 miliar yang dialokasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaimana untuk melanjutkan pembangunan jaringan pipa air bersih adalah langkah yang penting, terutama setelah penyelesaian proyek serupa di Kelurahan Kaimana Kota dan Kelurahan Krooy pada tahun 2024. Lanjutan pembangunan hingga Air Tiba dan Kampung Coa tentu akan memperluas akses air bersih bagi masyarakat di Distrik Kaimana, yang merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital.

Kepala Dinas PUPR Agustinus Tangyong menekankan pentingnya survei jalur-jalur yang akan dibangun untuk memastikan apakah jaringan pipa yang sudah ada masih bisa dimanfaatkan atau perlu diganti dengan pipa baru. Ini adalah langkah bijak untuk memastikan efisiensi anggaran, terutama mengingat adanya kemungkinan bahwa sebagian pipa lama sudah tidak layak digunakan. Dengan memanfaatkan pipa yang masih bisa digunakan, Pemkab bisa menghemat anggaran dan mempercepat pelaksanaan proyek.

Namun, seperti yang disoroti, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dapat berdampak pada kelancaran proyek ini. Pemangkasan anggaran bisa membuat

pelaksanaan pembangunan air bersih tidak optimal, yang tentu akan merugikan masyarakat yang sangat bergantung pada akses air bersih.

Sumber Berita:

Papuabarat.anataranews.com, “PUPR Kaimana Anggarkan Rp14 Miliar Lanjutkan Pembangunan Jaringan Air Bersih”, tanggal 19 Februari 2025

Catatan:

Hendrik Mambor Serahkan DPA 2025 Kepada Perangkat Daerah



Pimpinan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama menandatangani berita acara penyerahan DPA APBD 2025 di Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat, Selasa. (ANTARA/HO-Zack Tonu Bala)

Sumber gambar: papuabaratar.antaranews.com

Wasior - Bupati Teluk Wondama, Hendrik Mambor, menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2025 senilai Rp1,04 triliun kepada perangkat daerah. Penyerahan DPA ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disusun digunakan dengan efektif demi kepentingan masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa Bupati Mambor menekankan dua prinsip utama dalam pelaksanaan anggaran yakni efektivitas dan efisiensi. Hal ini sangat relevan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, apalagi di tengah situasi di mana efisiensi anggaran menjadi perhatian utama pemerintah pusat. Mambor mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk bukan hanya fokus pada penyerapan anggaran semata, tetapi juga pada hasil akhir yang berkualitas yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan anggaran yang berbasis pada kinerja dan kualitas hasil ini turut dipantau oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang bertugas untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana. Ini adalah langkah preventif untuk menghindari potensi penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Komitmen ini semakin diperkuat dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, yang menunjukkan adanya kesepakatan bersama untuk melaksanakan program dengan penuh tanggung jawab.

Penyerahan DPA ini juga menandakan awal dari pelaksanaan program-program pembangunan untuk tahun 2025, dengan harapan bahwa setiap program yang dijalankan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Teluk Wondama. Sebagai tambahan, proses pemantauan dan evaluasi yang ketat akan menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik.

Sumber Berita:

Papuabarat.antaranews.com, “Hendrik Mambor Serahkan DPA 2025 Kepada Perangkat Daerah”, tanggal 12 Februari 2025

Catatan:

Serahkan DPA Bupati Matret Berharap Aktifitas Pelayanan Berjalan



Foto Bersama Usai Bupati Matret Kokop Menyerahkan DPA kepada OPD Jumat (14/2/2024) (Foto: RRI/Dina)

Sumber gambar: rri.co.id

Bintuni - upati Teluk Bintuni, Matret Kokop, secara simbolis menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2025 kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dalam sebuah acara yang dihadiri oleh pejabat OPD dan kepala distrik. Penyerahan ini dilakukan menjelang akhir masa jabatan Bupati Petrus Kasihiw dan Wakil Bupati Matret Kokop, dan menjadi momen penting dalam memastikan pelaksanaan anggaran dapat dimulai dengan lancar setelah kepemimpinan mereka berakhir.

Bupati Matret Kokop menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang **efektif dan efisien**, sesuai dengan tujuan untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. Ia mengingatkan kepada seluruh OPD untuk cermat dalam merencanakan dan melaksanakan program yang telah dianggarkan, terlebih dalam kondisi anggaran yang terpengkas akibat kebijakan efisiensi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Menurut informasi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Anggaran BPKAD, Jefri Patinusa, terdapat pemangkasan anggaran sebesar Rp135 miliar yang berasal dari beberapa sumber, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp39 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp91 miliar, dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp4 miliar. Pemangkasan ini mencakup berbagai program kegiatan seperti perjalanan dinas, rapat, sosialisasi, dan bimbingan teknis. Hal ini tentu berdampak pada alokasi anggaran di

berbagai OPD, namun pembagian pemangkasan tersebut masih perlu dianalisis lebih lanjut untuk menentukan pos anggaran yang akan dipangkas.

Menghadapi pemangkasan anggaran ini, Pemkab Teluk Bintuni harus lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan dan memastikan bahwa kegiatan yang dipangkas tidak mengganggu program yang benar-benar penting bagi masyarakat. Selain itu, strategi efisiensi yang tepat harus diterapkan agar anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengurangi kualitas hasil yang ingin dicapai.

Sumber Berita:

RRI.co.id, “Serahkan DPA Bupati Matret Berharap Aktifitas Pelayanan Berjalan”, tanggal 14 Februari 2025

Catatan:

Pemkab Akan Menindaklanjuti KMK 29 Tahun 2025 Terkait Efisiensi Anggaran



Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaimana, Arsami S.E., M.M. (Sumber Foto : RRI/Wilhelmus Nurak)

Sumber gambar: rri.co.id

Kaimana - Pemerintah Kabupaten Kaimana menghadapi tantangan berat dalam menghadapi pengurangan anggaran pada tahun 2025 akibat kebijakan efisiensi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Pengurangan anggaran yang cukup signifikan ini, termasuk pengurangan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang mencapai kurang lebih Rp 32 miliar lebih, Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp 2 miliar lebih, dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 34 miliar lebih. Hal ini berdampak langsung pada sektor-sektor penting seperti konektivitas, jalan, dan pelayanan dasar.

Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala BPKAD Kaimana, Arsami S.E., M.M., total pengurangan anggaran untuk Kabupaten Kaimana mencapai lebih dari Rp 68 miliar. Salah satu dampaknya adalah pengurangan yang cukup besar pada sektor pekerjaan umum, yang mencakup pembangunan infrastruktur vital bagi masyarakat, seperti jalan dan sarana umum lainnya.

Arsami juga menambahkan bahwa sektor perjalanan dinas menjadi salah satu fokus efisiensi anggaran, dengan pengurangan hingga 50%. Namun, untuk kebijakan pengurangan ini, pihak Pemkab Kaimana masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri agar dapat diterapkan dengan tepat.

Sumber Berita:

RRI.co.id, “Pemkab Akan Menindaklanjuti KMK 29 Tahun 2025 Terkait Efisiensi Anggaran”, tanggal 19 Februari 2025

Catatan: